

DAFTAR PUSTAKA

- Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945 (2000).
- Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda. "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan." *Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 1–19.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431>.
- Asmadi, Erwin. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De Legalata* 3, no. 1 (2018).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fdelegalata.v3i1.3136>.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Campbell, Rebecca, and Sheela Raja. "Secondary Victimization of Rape Victims: Insights From Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence." *Violence and Victims* 14, no. 3 (1999).
<https://doi.org/10.1891/0886-6708.14.3.261>.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. "General Recommendation No. 19: Violence against Women," 1992.
- . "General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence against Women, Updating General Recommendation No.19," 2017.
- . "General Recommendation No.28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women," 2010.
- . "General Recommendation No.33 on Women's Access to Justice," 2015.
- Cook, Rebecca, and Simone Cusack. *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*. USA: University of Pennsylvania, 2020.
- Cusack, Simone, and Lisa Pusey. "CEDAW and the Right to Non-Discrimination and Equality." *Melbourne Journal of International Law* 54 14, no. 1 (2013).
- Doerner, William G., and Steven P. Lab. *Victimology*. 4th ed. Cincinnati: Ohio: Andersen Publishing, 2002.
- Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 30 September 2020 (2020).
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fauzan, H.M. *Peranan PERMA Dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum*

Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung. Jakarta: Preneda Media Group, 2013.

Fauziyah, Aliani, Lilis Ratnaningsih, and Yuyut Prayuti. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Pemuliaan Hukum* 2, no. 1 (2019): 27–32.

Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Hasanah, Defi Uswatun. "Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Hukum." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2016): 109–16. <https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7564>.

Hasil Wawancara Heri Kurniawan. "Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, 19 Januari 2022." n.d.

Hasil Wawancara Nurul Kurniati. "Konselor Hukum Pada Rifka Annisa Women's Crisis Center, 18 Januari 2022." 2022.

Hasil Wawancara Tri Riswanti. "Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, 18 Januari 2022." 2022.

Hasil Wawancara Vonny Trisaningsih. "Hakim Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, 9 Desember 2021." 2021.

Hopper, Jim. "Freezing During Sexual Assault and Harassment." *Psychology Today*, 2018. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/sexual-assault-and-the-brain/201804/freezing-during-sexual-assault-and-harassment>.

ICJR. "ICJR Mengapresiasi Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." Institute for Criminal Justice Reform, 2017. <https://icjr.or.id/icjr-mengapresiasi-terbentuknya-peraturan-mahkamah-agung-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum/>.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS). "Media Rilis: Kejaksaan Agung Luncurkan Pedoman Untuk Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Perempuan Dan Anak." 8 Maret, 2021. <http://ijrs.or.id/media-rilis-kejaksaan-agung-luncurkan-pedoman-untuk-peningkatan-akses-keadilan-terhadap-perempuan-dan-anak/>.

International Commission of Jurists. *Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia* (2016).

Irianto, Sulistyowati, and L.I. Nurtjahyo. *Perempuan Di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, 2006.

Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2012.

Kejaksaan Republik Indonesia. Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (2021).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Indonesia Dan Hak Asasi Manusia." 28 Maret, 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (2008).

———. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (2007).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1958.

Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2019.

———. "Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan." Jakarta, 2020.

———. "Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19." Jakarta, 2021.

———. "Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Untuk Memperkuat Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan." Maret, 2020. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/pedoman-penyelenggaraan-sistem-peradilan-pidana-terpadu-untuk-memperkuat-akses-keadilan-bagi-perempuan-korban-kekerasan>.

———. "Siaran Pers Komnas Perempuan Refleksi 35 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW Di Indonesia: 'Merawat Bangsa Dengan Memperkuat Komitmen Bersama Menjalankan Mandat CEDAW Untuk Menjamin HAM Perempuan Di Indonesia.'" Jakarta, 2019. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-35-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia-jakarta-24-juli-2019>.

———. “Siaran Pers Peluncuran Hasil Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP.” 15 Desember, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-peluncuran-hasil-kajian-penerapan-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-3-tahun-2017-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-di-5-mitra-wilayah-sppt-pkkt-15-desember-2021>.

Komnas Perempuan, and Forum Pengada Layanan. *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Memperkuat Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan* (2020).

Krisna, Liza Agnesta. “Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak.” *Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 150.

Laksita, Doni. “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Atas Tindakan Reviktimisasi Oleh Hakim.” Universitas Gadjah Mada, 2019.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Serta Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, 2018. https://lemdik.polri.go.id/index.php?p=show_detail&id=264&keywords=perempuan.

———. *Perlindungan Saksi Dan Korban*, 2021. https://lemdik.polri.go.id/index.php?p=show_detail&id=750&keywords=korban.

Lianawati, Ester. *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif Psikologi Feminis*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.

Luhulima, Achie Sudiarti. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Ketua MA: ‘Hakim Perempuan Indonesia Memiliki Peran Penting Dalam Pembangunan Hukum Nasional.’” 21 Januari, 2018. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2905/ketua-ma-hakim-perempuan-indonesia-memiliki-peran-penting-dalam-pembangunan-hukum-nasional>.

———. “Kunjungan Dan Audiensi Hakim Perempuan Empat Lingkungan Badan Peradilan Se-Indonesia Ke Mahkamah Agung RI.” 19 Januari, 2018. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2903/kunjungan-dan-audiensi>

hakim-perempuan-empat-lingkungan-badan-peradilan-se-indonesia-ke-mahkamah-agung-ri.

- . “MA Berkomitmen Memenuhi Hak-Hak Perempuan Dan Anak.” 15 April, 2021. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4604/ma-berkomitmen-memenuhi-hak-hak-perempuan-dan-anak>.
- . “MA Memperingati Hari Perempuan Internasional.” 8 Maret, 2018. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2962/ma-peringati-hari-perempuan-internasional>.
- . *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018.
- . “Pembaruan Peradilan Sebagai Ikhtiar Mewujudkan Court Excellence.” 10 Desember, 2021. <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/4965/pembaruan-peradilan-sebagai-ikhtiar-mewujudkan-court-excellence>.
- . “Resmikan Seminar Internasional, Prof. Syarifuddin Nyatakan MA Berkomitmen Penuhi Hak Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan.” 25 Oktober, 2021. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4874/resmikan-seminar-internasional-prof-syarifuddin-nyatakan-ma-berkomitmen-penuhi-hak-perempuan-dan-anak-dalam-penyelesaian-perkara-di-peradilan>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, and Komisi Yudisial Republik Indonesia. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 147/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (2009).
- Mahkamah Pidana Internasional. Statuta Roma (1998).
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993).
- . Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979).
- MaPPI FHUI. “Cerita Perubahan ‘Perma No.3 Tahun 2017: Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan.’” 24 Juli, 2018. <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>.
- . “Sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Jogja.” 9 Mei, 2018. <http://mappifhui.org/2018/05/09/sosialisasi-perma-no-3-tahun-2017-jogja/>.

- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurhilmiyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.” *De Legalata* 4, no. 2 (2019): 211–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v4i2.3172>.
- Pangabean, Hendry P. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (2017).
- Perilloux, Carin, Joshua D. Duntley, and David M. Buss. “Blame Attribution in Sexual Victimization.” *Personality and Individual Differences* 63 (2014): 81–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.058>.
- Petherick, Wayne A. “Victim Precipitated Criminal Homicide.” *Forensic & Criminology International Journal* 5, no. 2 (2017): 112. <https://doi.org/https://doi.org/10.15406/frcij.2017.05.00148>.
- Piquero, Alex R., John MacDonald, Adam Dobrin, Leah E. Daige, and Francis T. Cullen. “Self-Control, Violent Offending, and Homicide Victimization: Assessing the General Theory of Crime.” *Journal of Quantitative Criminology* 21, no. 1 (2005): 55–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10940-004-1787-2>.
- Pramesti, Yustisia Pratiwi. “Persepsi Aparat Penegak Hukum Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017.” Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Prasetyawati, S. Endang. “Kedudukan Produk Hukum Dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Undang-Undang Nasional.” *Pranata Hukum* 14, no. 15–24 (2019).
- Rahman, Abdul. “Inilah Materi Pelatihan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-materi-pelatihan-perma-nomor-3-tahun-2017>.
- Rais, Natasya Fila, Gracia Putri Manurung, and Agnes Kusuma Wardani. “Analisis Keberlakuan RKUHP Dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual.” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 55–68.

<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.29788>.

Rifka Annisa Women's Crisis Center. "Data Pengakses Layanan Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta." Yogyakarta, 2021.

Rodliyah, Widodo Dwi Putro, and RR Cahyowati. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Prosiding SAINTEK 3* (2021): 237–60.

Sayuti, Hendri. "Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)." *Menara* 12, no. 1 (2013).

Schafer, Stephen. "Victimology: The Victim and His Criminal a Study in Functional Responsibility." *Random House Inch* 5, no. 3 (1968): 76.

Setiawan, Bayu. "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi." *Jurnal Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018): 35–53. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Soeparmono, R. *Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2016.

Sumardjono, Maria. S. W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Sumitro, Ronny Hanintyo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Tama, Gana Aria. "Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik Menurut Konsepsi Mahkamah Agung Republik Indonesia." *OSF Preprints*, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/8k2eh>.

Tamin, Budianto Eldist. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018): 112–21.

Triwati, Ani. "Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 9, no. 1 (2019): 72–91. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v9i1.1445>.

UN WOMEN, UNFPA, WHO, UNDP, UNODC, Australian Aid, Spanish

Cooperation, and EMAKUNDE. *Module 3 Justice and Policing, “Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence” (Core Elements and Quality Guideline)*. New York, 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2014).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (1984).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (1981).

United Nations. Resolution 1820 (2008) Adopted by the Security Council at its 5916th meeting (2008).

United Nations General Assembly. Universal Declaration of Human Rights (1948).

Wahid, Abdul, and Muhammad Irfan. *Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.